

Pelaksanaan Awal Program Cetak Sawah Rakyat sebagai Arena Sosial: Aktor, Pengetahuan, dan Partisipasi Petani di Desa Sribandung

The Early Implementation of the Community Rice Field Development Program as a Social Arena: Actors, Knowledge, and Farmer Participation in Sribandung Village

Viora Natama Lumban Batu & Sri Anom Amongjati*

Program Studi Agribisnis Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sri.anomamongjati@upnyk.ac.id

Abstract:

The Community Rice Field Development Program is not only a technical activity of land clearing, but also a social process that brings together the government, technical teams, village governments, extension workers, farmer groups, landowners, and prospective farmers. This study aims to analyze the initial implementation of the program as a social arena, knowledge gathering, and space for farmer participation in Sribandung Village. The study used a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed thematically using Norman Long's actor-oriented approach and Arnstein's ladder of participation. The results show that technical knowledge regarding land feasibility meets local knowledge regarding rivers, floods, droughts, and the history of farming. Farmers actively convey information and aspirations, but decision-making authority is still dominated by program implementers. Farmer participation is at the information and consultation level, not yet reaching the partnership level.

Keywords: Farmer Participation, Local Knowledge, Rice Field Development, Rural Development, Social Arena

Abstrak:

Program Cetak Sawah Rakyat tidak hanya merupakan kegiatan teknis pembukaan lahan, tetapi juga proses sosial yang mempertemukan pemerintah, tim teknis, pemerintah desa, penyuluh, kelompok tani, pemilik lahan, dan calon penggarap. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan awal program sebagai arena sosial, pertemuan pengetahuan, dan ruang partisipasi petani di Desa Sribandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan berorientasi aktor Norman Long dan tangga partisipasi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan teknis mengenai kelayakan lahan bertemu dengan pengetahuan lokal mengenai sungai, banjir, kekeringan, dan sejarah usaha tani. Petani aktif menyampaikan informasi dan aspirasi, tetapi kewenangan keputusan masih didominasi pelaksana program. Partisipasi petani berada pada tingkat informasi dan konsultasi, belum mencapai tingkatan kemitraan.

Kata Kunci: Partisipasi Petani, Pengetahuan Lokal, Cetak Sawah Rakyat, Pembangunan Pedesaan, Arena Sosial



1. Pendahuluan

Upaya pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan sawah dan keberlanjutan produksi padi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari program pembangunan. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan program cetak sawah rakyat yang dilakukan dengan melakukan penetapan calon petani dan calon lokasi, kepastian status lahan, ketersediaan sumber air, survei investigasi dan desain, serta kesiapan pengelolaan sebagai bagian penting dari pelaksanaan program (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2024). Artinya proses ini tidak hanya semata-mata berupa kontruksi lahan, tetapi juga suatu proses yang menghubungkan antara kebijakan pusat dan implementasinya bersama dengan masyarakat.

Disisi lain, dalam beberapa kasus pelaksanaan cetak sawah belum otomotis menghasilkan keberlanjutan usaha tani. Kasus yang terjadi di Kabupaten Katingan memperlihatkan bahwa program cetak sawah dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja namun masih menghadapi kelemahan pada dimensi kelembagaan dan infrastruktur yang lemah secara keberlanjutan (Mustapa dkk., 2023). Begitu juga kasus yang terjadi Kabupaten Bombana dimana persepsi masyarakat mengalami perubahan dari yang tinggi penerimaannya pada tahapan sosialisasi yang diikuti kekhawatiran dan kecemasan dalam proses pengadaan lahan dan pekerjaan fisik khususnya atas resiko sosial dan lingkungan yang akan dihadapi (Rela & Agustina, 2026). Artinya keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah luasan sawah/calon sawah yang dicetak, tetapi juga dari kesiapan kelembagaan, kejelasan tindak lanjut program, pihak-pihak yang bertemu dalam program ini, hingga kepercayaan masyarakat atas program ini yang dapat berjalan dengan baik.

Berbagai penelitian yang terkait dengan pembangunan pertanian juga menunjukkan bahwa keberhasilan program cetak sawah juga tidak hanya pada rasa percaya yang muncul dari masyarakat atas program yang ada, melainkan juga berkaitan erat dengan proses partisipasi masyarakat melalui tingkat kehadiran, kontribusi tenaga, atau keterlibatan petani dalam kelompok. Partisipasi petani dan kemampuan mengakses informasi adalah aspek penting (Subejo dkk., 2025), namun belum berarti menunjukkan petani memiliki pengaruh terhadap setiap keputusan yang ada. Artinya kehadiran petani dalam aktivitas sosialisasi belum berarti dapat memenuhi harapan atas proses partisipatif tersebut.

Arnstein (1969) menegaskan bahwa inti partisipasi terletak pada distribusi kekuasaan, mulai dari pemberian informasi dan konsultasi hingga kemitraan, pendelegasian kewenangan, dan kontrol warga. Cornwall (2008) juga mengingatkan bahwa istilah partisipasi harus dijelaskan melalui siapa yang terlibat, ruang apa yang tersedia, siapa yang menentukan agenda, dan seberapa jauh suara masyarakat memengaruhi keputusan. Untuk membacanya, pendekatan berorientasi aktor milik Norman Long digunakan dimana Long memandang program pembangunan merupakan suatu pola yang tidak bergerak secara linear dari perencana kepada penerima melainkan masuk kedalam arena sosial yang telah memiliki sejarah, pengetahuan, kepentingan, dan strategi yang berbeda dari para aktor (Hebinck dkk., 1997; Landini dkk., 2014). Ini yang disebutkan sebagai sosial interfase/titik perjumpaan sosial dimana masing-masing aktor, seperti pemerintah, tenaga ahli, penyuluh, pemerintah desa, kelompok tani, pemilik lahan, dsb memiliki pengetahuan, otoritas, dan kepentingan yang saling dinegosiasikan. Artinya petani bukanlah penerima pasif, melainkan sebagai pihak yang dapat menerima, menunda, menafsirkan, mengajukan syarat, atau menuntut adanya perubahan sesuai pengalaman dan resiko yang mungkin akan dihadapi.

Program Cetak Sawah di Desa Sribandung menjadi penting untuk dilihat karena program cetak sawah masuk kedalam masyarakat yang pernah memiliki basis pertanian padi, tetapi kemudian mengalami pendangkalan dari Sungai Boom dan Sungai Berlian, gangguan irigasi, banjir pada musim hujan, serta kekeringan pada musim kemarau. Ketidakpastian air menyebabkan lahan sawah ditinggalkan dan mata pencaharian bergeser menuju karet, kelapa sawit, peternakan, perdagangan kecil, dan pekerjaan informal. Peralihan tersebut tidak hanya mengubah sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga mengurangi praktik kerja kolektif yang ada dalam budaya padi sawah. (Hebinck dkk., 1997)

Selama ini, penelitian terdahulu mengenai cetak sawah cenderung menempatkan masyarakat sebagai responden yang menilai dampak dan keberlanjutan program. Namun belum ada penelitian yang menempatkan tahapan awal program sebagai arena sosial tempat berbagai pihak saling mendefinisikan masalah, bagaimana menentukan calon petani dan calon lokasi, serta sampai sejauh mana aspirasi dan pandangan warga masyarakat dapat turut serta mengubah keputusan. Kekosongan ini menjadi penting mengingat mekanisme yang terjadi pada tahapan persiapan ini juga akan menentukan rasa memiliki pada tahapan pelaksanaan dan pascaprogram. Oleh karena itu artikel ini akan menjawab tiga hal penting, yaitu bagaimana program diterjemahkan melalui pembagian peran dan kewenangan para aktor, bagaimana pengetahuan teknis berinteraksi dengan pengetahuan lokal, dan sampai mana petani memiliki ruang dan pengaruh untuk mengambil keputusan. Dengan itu penelitian ini akan menjelaskan bahwa penerimaan petani tidak hanya pada soal setuju atau tidak setuju, namun dengan berbagai syarat yang menyertainya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Dari konsep yang dijelaskan oleh Baxter & Jack (2008), maka studi kasus memungkinkan peneliti untuk menghubungkan kebijakan, kondisi lingkungan, pengalaman historis masyarakat, dan interaksi kelembagaan sebagai satu kesatuan analisis. Membaca kasus cetak sawah, maka dapat terbangun suatu pemahaman atas proses, makna, dan relasi antarpelaku dalam konteks pelaksanaan awal program cetak sawah rakyat. Secara *purposive*, ditentukanlah informan mencakup kepala desa dan perangkat desa, petani calon penerima, pemilik lahan, dan calon penggarap, pengurus kelompok tani, penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Banyuasin III, anggota tim UPN “Veteran” Yogyakarta yang terlibat dalam Survei Investigasi dan Desain sosial ekonomi, tokoh masyarakat, serta masyarakat nonpenerima. Adapun informasi yang digali mencakup sejarah pertanian desa, perubahan fungsi sungai dan irigasi, proses sosialisasi, penentuan calon petani dan calon lokasi, pembagian peran, pengetahuan mengenai kelayakan lahan, bentuk keterlibatan petani, serta harapan dan kekhawatiran terhadap program.

Proses analisis dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang ada dalam proses analisis data Kualitatif (Nowell dkk., 2017). Sedangkan tahapan kedua dilakukan pengkodean deduktif dalam konsep aktor, agensi, intervensi terencana, *social interface*, pengetahuan, sumberdaya, dan kewenangan dari Long serta kategori informasi, konsultasi, kemitraan, dan pembagian kekuasaan dari Arnstein (1969). Ruang lingkup artikel ini dibatasi pada tahapan persiapan program dikarenakan pengambilan data informasi dilakukan saat program cetak sawah berada pada tahapan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan pelaksanaan awal program cetak sawah rakyat di Desa Sribandung menggunakan dua kerangka teori yang saling melengkapi. Teori Norman Long yang dijelaskan oleh Hebinck dkk. (1997) dan Landini dkk. (2014) digunakan untuk memahami program sebagai arena sosial yang mempertemukan aktor, kepentingan, pengetahuan, dan kewenangan yang berbeda. Sementara itu, Arnstein (1969) digunakan untuk menilai kedalaman partisipasi petani terutama dengan melihat apakah keterlibatan petani hanya berada pada tahap menerima informasi dan memberikan masukan atau telah sampai pada pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan tabel 1, program cetak sawah rakyat merupakan arena sosial yang mempertemukan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan pengetahuan yang berbeda. Pemerintah dan tim teknis membawa program, target penyelesaian, aturan, peta, serta parameter kelayakan lahan yang dapat diikuti program cetak sawah rakyat. Pemerintah desa membawa pengetahuan administratif dan gambaran kondisi masyarakat, sedangkan petani membawa pengalaman mengenai dinamika pengelolaan padi sawah masa lampau hingga terjadinya banjir dan beralih kepada komoditas sawit dan karet.

Situasi tersebut juga memberikan perbedaan kepada bagaimana masing-masing aktor memaknai kebutuhan utama program. Bagi pemerintah program cetak sawah rakyat bertujuan memperluas areal sawah dan meningkatkan produksi pangan. Sedangkan bagi petani, pertanyaan mendasar tentang penyelesaian serta normalisasi fungsi air dan sungai menjadi pertanyaan mendasar. Situasi ini tidak dapat dilihat sebagai penolakan melainkan sebagai bentuk kehati-hatian atas pengalaman dan resiko yang pernah dihadapi.

Perbedaan tujuan dan kepentingan sebagaimana yang digambarkan oleh Long dalam arena sosial merupakan hasil intervensi yang dipengaruhi oleh kemampuan setiap aktor untuk menjadikan pengetahuan sebagai dasar keputusan terkait program cetak sawah rakyat. Pengetahuan teknis yang dimiliki institusi dalam bentuk prosedur, data teknis, dan kapasitas untuk penetapan kelayakan sebagai suatu pengetahuan teknis berhadapan dengan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal terkait sejarah, batas lahan, dan risiko usaha tani yang pada akhirnya tetap tidak memiliki kewenangan paling akhir.

Pertemuan pengetahuan teknis dan pengetahuan lokal oleh karena itu perlu dilihat dari sejauh mana informasi tersebut benar-benar mengubah rancangan program. Setiap pengetahuan yang diproduksi dalam bentuk lokasi yang sering banjir, bagian sungai yang mengalami sedimentasi, atau lahan yang tidak memperoleh air tidak cukup hanya dicatat dalam wawancara melainkan perlu diterjemahkan dalam penetapan lokasi, desain saluran, dan urutan pekerjaan. Apabila pengetahuan lokal ditelusuri dalam hasil pemetaan dan desain, maka petani ditempatkan sebagai produsen pengetahuan. Sebaliknya, apabila tidak memengaruhi keputusan, pelibatan masyarakat dapat berujung menjadi pelengkap administratif saja. Inilah yang dijelaskan oleh Landini dkk. (2014) dimana perjumpaan pengetahuan akan berkaitan dengan proses penentuan pengetahuan mana yang dianggap sah.

Tabel 1. Interpretasi Pelaksanaan Program Berdasarkan konsep Norman Long (Hebinck dkk., 1997; Landini dkk., 2014)

Konsep Long	Temuan di Desa Sribandung	Interpretasi
Intervensi terencana	Pemerintah membawa Program Cetak Sawah Rakyat dengan tujuan memperluas sawah, menentukan calon petani dan calon lahan, serta melakukan pemetaan dan verifikasi teknis.	Program dirancang pemerintah, tetapi pelaksanaannya harus menyesuaikan kondisi sosial dan lingkungan desa.
Aktor	Program melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, BPP, UPNYK, kelompok tani, pemilik lahan, dan calon penggarap.	Pelaksanaan program tidak dilakukan oleh satu pihak, tetapi melibatkan aktor dengan kepentingan, pengetahuan, dan kewenangan yang berbeda.
Social interface	Para aktor bertemu dalam sosialisasi, wawancara sosial ekonomi, pemetaan lahan, peninjauan lokasi, dan validasi calon petani serta calon lahan.	Kegiatan tersebut menjadi arena pertemuan antara kepentingan pemerintah, pertimbangan teknis, dan kebutuhan petani. Pemerintah menekankan target dan prosedur pelaksanaan, sedangkan petani menekankan kepastian sumber air dan kepastian program untuk berjalan.
Pertemuan pengetahuan	Tim teknis menggunakan peta, data tanah, tata ruang, topografi, dan hidrologi. Petani memberikan informasi tentang pendangkalan sungai, banjir, kekeringan, batas lahan, dan sejarah usaha tani.	Program mempertemukan pengetahuan teknis dengan pengetahuan lokal. Keduanya saling melengkapi, tetapi keputusan akhir mengenai kelayakan lahan masih berada pada institusi pelaksana.
Agensi petani	Petani mendukung program, tetapi tetap berhati-hati dan meminta agar masalah sungai serta irigasi diselesaikan.	Petani bukanlah penerima pasif. Mereka melihat program dengan bayangan pengalaman kegagalan masa lalu dan menempatkan kepastian air sebagai syarat penting keberhasilan program.

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Tabel 2. Interpretasi Partisipasi Petani Berdasarkan (Arnstein, 1969)

Tingkat partisipasi	Bentuk keterlibatan petani	Interpretasi
Pemberian informasi	Petani mengikuti sosialisasi dan memperoleh penjelasan mengenai tujuan, tahapan, dan rencana Program Cetak Sawah Rakyat.	Informasi telah diberikan kepada masyarakat, tetapi aliran informasi masih lebih banyak berasal dari pelaksana program kepada petani.
Konsultasi	Petani diwawancarai, memberikan data sosial ekonomi, menjelaskan kondisi lahan, menunjukkan batas lahan, serta menyampaikan masalah air dan irigasi.	Petani telah memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan pendapatnya.
Placation atau akomodasi terbatas	Kelompok tani dan perangkat desa menjadi penghubung antara petani dengan pelaksana program.	Perwakilan petani mulai dilibatkan, tetapi belum terdapat bukti bahwa mereka mempunyai kewenangan yang setara dalam menentukan keputusan.
Kemitraan	Belum ditemukan pembagian kewenangan formal dalam menentukan lokasi akhir, desain irigasi, anggaran, jadwal, dan mekanisme pengawasan.	Partisipasi belum mencapai kemitraan karena keputusan utama masih berada pada pemerintah dan institusi pelaksana program.

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Petani sebagai agensi juga memberikan respon untuk menerima secara bersyarat. Antusiasme untuk kembali menanam padi berjalan bersama kekhawatiran bahwa program tidak ikut serta menyelesaikan masalah banjir, pengendapan air, dan irigasi air. Ini bukanlah penolakan program, melainkan sebagai rasa hati-hati atas pengalaman dan risiko kegagalan pertanian dan berbagai bantuan sebelumnya. Gambaran ini telah dijelaskan oleh Mustapa dkk. (2023) serta Rela & Agustina (2026) bahwa keberlanjutan cetak sawah dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kelembagaan, serta perubahan persepsi masyarakat sepanjang tahapan program. Oleh karena itu kepercayaan dapat dibangun diatas kepastian dan kesepakatan tindak lanjut yang mengikat, bukan hanya sosialisasi.

Merujuk pada konsep partisipasi Arnstein (1969), keterlibatan petani dalam pelaksanaan awal program cetak sawah rakyat berada pada tingkatan pemberian informasi dan konsultasi. Petani tidak hanya menghadiri sosialisasi, namun juga memberikan data, menjelaskan kondisi lahan, memberikan batas wilayah, kondisi pengendapan sungai, hingga menyampaikan kebutuhan terhadap irigasi, pelatihan, dan sarana produksi. Walaupun demikian, proses keterlibatan tersebut belum disebutkan sebagai suatu proses partisipasi dalam konteks yang dijelaskan Arnstein (1969). Belum adanya bukti teknis bahwa petani memiliki kapasitas dan kewenangan yang sama dalam menentukan lokasi akhir, desain irigasi, anggaran, jadwal pelaksanaan, atau mekanisme pengawasan menjadi gambaran belum adanya proses partisipatif tersebut. Sebaliknya, seluruh proses keputusan tersebut menjadi ranah bagi institusi yang membawa program sekalipun petani diberikan ruang untuk bicara dan berpendapat. Konteks tersebutlah yang membedakan antara konsultasi dan kemitraan menurut Arnstein (1969). Perbedaan antara konsultasi dan kemitraan terletak pada adanya daya tawar dan pembagian kekuasaan dan dalam kasus tersebut petani belum punya kuasa untuk mengambil keputusan penting.

Transformasi dari konsultasi menuju kemitraan dapat melalui beberapa mekanisme yang dapat diterapkan seiring berjalannya program cetak sawah rakyat, yaitu keterbukaan kriteria calon petani dan calon lahan, kesempatan memperbaiki data, berita acara yang mencatat tindak lanjut aspirasi, penyusunan desain irigasi bersama, serta forum pengawasan yang melibatkan petani, pemerintah desa, BPP, dan pelaksana teknis. Artinya petani tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi ikut mengawasi dan menentukan bagaimana program dapat bermanfaat bagi usaha pertaniannya. Untuk menjalankannya, pendampingan BPP dan penguatan kelompok tani menjadi penting untuk membantu petani memahami informasi teknis sekaligus menyampaikan kepentingannya secara kolektif (Subejo dkk., 2025).

Teori yang digambarkan oleh Norman Long (Hebinck dkk., 1997; Landini dkk., 2014) dan teori yang dijelaskan oleh Arnstein (1969) menunjukkan bahwa persoalan utama pelaksanaan awal program bukan tidak adanya keterlibatan petani, namun belum seimbangannya posisi para aktor, khususnya untuk mengubah ruang informasi menjadi keputusan. Arena sosial dan ruang konsultasi telah dibentuk, namun kewenangan yang sifatnya strategis tetap terpusat pada institusi pelaksana. Dalam proses persiapan awal program cetak sawah rakyat, langkah partisipatif tidak boleh hanya berhenti pada selesainya pemetaan dan validasi lahan, namun juga pada pengambilan keputusan yang menghubungkan pengetahuan lokal dengan pengetahuan teknis secara lebih setara. Pada titik ini arena sosial dapat berkembang dari koordinasi administratif menjadi suatu kemitraan yang menguntungkan.

4. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan awal program cetak sawah rakyat di Desa Sribandung menunjukkan bahwa program pembangunan pertanian tidak hanya berlangsung sebagai proses teknis dan administratif, tetapi juga sebagai arena sosial yang mempertemukan aktor, kepentingan, pengetahuan, dan kewenangan yang berbeda. Pemerintah melalui tim teknis membawa target program, prosedur, peta, serta parameter kelayakan lahan, sedangkan pemerintah desa bersama petani membawa pengetahuan administratif, sejarah pengelolaan lahan, pengalaman banjir dan kekeringan, kondisi sungai, serta risiko kegagalan usaha tani. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan teknis dan pengetahuan lokal dapat saling melengkapi, tetapi kewenangan akhir dalam penetapan lokasi dan rancangan program masih berada pada institusi pelaksana.

Petani telah terlibat melalui sosialisasi, wawancara sosial ekonomi, pemetaan lahan, penunjukan batas, dan penyampaian kebutuhan terhadap air, irigasi, pelatihan, serta sarana produksi. Namun, berdasarkan tangga partisipasi Arnstein, keterlibatan tersebut masih berada terutama pada tingkat pemberian informasi dan konsultasi. Belum terdapat bukti bahwa petani memperoleh kewenangan yang setara dalam menentukan lokasi akhir, desain irigasi, anggaran, jadwal pelaksanaan, ataupun mekanisme pengawasan. Penerimaan petani terhadap program juga bersifat positif tetapi bersyarat. Kehati-hatian mereka tidak menunjukkan penolakan, melainkan pertimbangan rasional yang terbentuk dari pengalaman kegagalan pertanian dan ketidakpastian ketersediaan air pada masa sebelumnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan program perlu diarahkan dari tingkatan konsultasi menuju tingkatan kemitraan melalui keterbukaan kriteria calon petani dan calon lahan, kesempatan memperbaiki data, pengakuan terhadap pengetahuan lokal dalam desain teknis, serta pembentukan forum pengawasan bersama yang melibatkan petani, kelompok tani, pemerintah desa, BPP, dan pelaksana teknis. Karena penelitian dilakukan ketika program masih berada pada tahap persiapan, temuan ini belum dapat menilai keberhasilan konstruksi maupun keberlanjutan usaha tani setelah sawah berproduksi. Penelitian lanjutan diperlukan untuk melihat perubahan posisi petani, pelaksanaan irigasi, pengelolaan lahan, serta distribusi manfaat pada tahap pelaksanaan dan pascaprogram.

Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking “Participation” Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>.

- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2024). 63.6-Petunjuk-Teknis-Cetak-Sawah-TA-2025. In Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun 2025. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Hebinck, P., Den Ouden, J., & Verschoor, G. (1997). Past, Present and Future: Long's Actor-Oriented Approach at the Interface. *Resonances and Dissonances in Development: Actors, networks and cultural repertoires*, 1-19. <https://edepot.wur.nl/361020>.
- Hebinck, P., den Ouden, J., & Verschoor, G. (2001). Past, Present and Future: Long's Actor-Oriented Approach at the Interface. *Resonances and Dissonances in Development: Actors, Networks and Cultural Repertoires*, 1-19.
- Landini, F. P., Long, N. E., Leeuwis, C., & Murtagh, S. (2014). Theoretical Guidelines for a Psychology of Rural Development. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 11(74), 125–147.
- Batu, V. N. L. (2026). Respon Petani terhadap Program Cetak Sawah Rakyat: Studi kasus Desa Sribandung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Mustapa, L. A., Purnamadewi, Y. L., & Dharmawan, A. H. (2023). Dampak dan Keberlanjutan Program Cetak Sawah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 17(2), 123-137. <https://doi.org/10.21082/akp.v17n2.2019.123-137>.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Rela, I. Z., & Agustina, D. (2026). Program Cetak Sawah dan Keberlanjutan Lingkungan: Persepsi Masyarakat di Tahap Pra dan Konstruksi di Kabupaten Bombana. *Jurnal Ilmiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*, 5(2), 282-296. <https://doi.org/10.56189/jiikpp.v5i2.67>.
- Subejo, S., Zain, H. A., Akhda, N. T., Salim, I., Bunda, A. K., Guslimantasya, P. K., Nurhasanah, S., Aida, F., H., & Fauziah, B. N. H. (2025). Agricultural Extension Governance and Services in Responding to Problems of the Agricultural Sector and Extension Institutions. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(3), 653-667.